

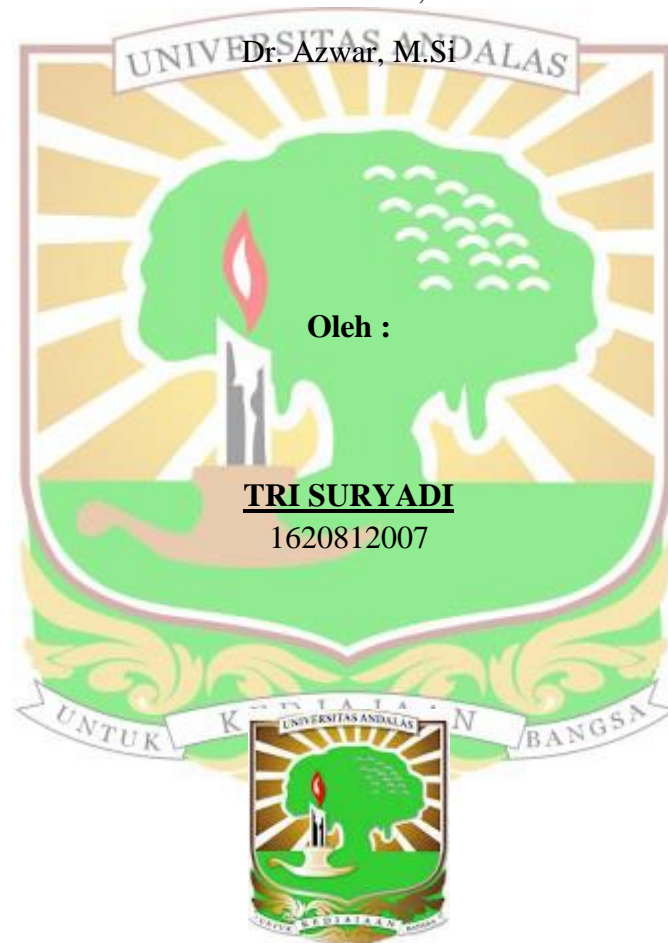
**KONTESTASI ELITE BIROKRASI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

Pembimbing :

Dr. Bob Alfiandi, M.Si

Dr. Azwar, M.Si



Oleh :

TRI SURYADI

1620812007

**PROGRAM MAGISTERSOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

KONTESTASI ELITE BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh: Tri Suryadi

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah fenomena fragmentasi tafsir elite birokrasi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akibat fragmentasi tafsir UU Desa, status pemekaran nagari menjadi terkatung-katung. Permasalahan ini penting dan urgen diteliti karena, *pertama*, pada tataran empirik resonansi destruktif permasalahan ini telah melebar ke banyak sektor pemerintahan di Kab.Padang Pariaman. Sehingga berdampak terhadap pengelolaan keuangan Nagari dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. *Kedua*, pada tataran teoritik kajian ini penting dilakukan karena banyak persoalan bangsa berangkat dari fragmentasi tafsir elite birokrasi terhadap Undang-Undang yang salah satunya UU Desa dalam kasus ini.

Teori yang menghela penelitian ini adalah aliran pemikiran Sosiologi Interpretif (hermeneutics) seperti Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, Hans Georg Gadamer, dan Homi K.Bhabha. sedangkan paradigma penelitian diletakkan pada paradigma penelitian konstruktivis, dengan metode hermeneutik. Metode pengumpulan datanya partisipan observasi (versi Wilhelm Dilthey), dengan penetapan informan dipilih dengan sengaja. Adapun analisis data dilakukan dengan metode interpretasi (versi Wilhelm Dilthey). Lokasi penelitian berada di Kab.Padang Pariaman, dimana terdapat kasus pemekaran 43 nagari dimaksud.

Kata kunci : Kontestasi Elit, Pemerintah, 43 Nagari, Padang Pariaman

